



BADAN PUSAT STATISTIK



POTENSI

Desa Bikang

2024-2025



KATA PENGANTAR

Publikasi Potensi Desa merupakan publikasi yang berisi data dan indikator strategis mengenai kondisi dan potensi yang ada di desa/kelurahan. Data dan indikator terkait kondisi dan potensi desa/kelurahan diperoleh dari hasil kegiatan pendataan Potensi Desa (Podes) 2024 dan 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang terdiri dari data identitas desa, kondisi geografis, infrastruktur, kondisi sosial, bencana alam serta potensi perekonomian. Selain itu publikasi ini juga berisi data dari desa/kelurahan terkait beberapa pertanyaan yang sering dikumpulkan oleh K/L/D/I lain.

Publikasi ini dapat diselesaikan berkat kerjasama dan partisipasi berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi para pengguna data. Tanggapan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan di edisi yang akan datang.

Bikang, Juli 2026

Kepala Desa Bikang



Zulfani

DAFTAR ISI

A.	Perumahan dan Lingkungan Hidup	4
1.	Penggunaan Listrik	4
2.	Penerangan Jalan Utama	5
3.	Bahan Bakar Memasak	7
4.	Kejadian dan Pengaduan Pencemaran	8
5.	Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Lingkungan	9
B.	Infrastruktur Komunikasi dan Informasi.....	13
1.	Keberadaan Menara BTS, Sinyal Telepon Seluler, dan Internet di Desa Bikang.....	13
1.1.	Keberadaan Menara Base Transceiver Station (BTS)	13
1.2.	Ketersediaan Operator Layanan Komunikasi	14
C.	Ketersediaan Fasilitas Aksesibilitas Dasar	17
1.	Fasilitas Pendidikan.....	18
1.3.	Fasilitas Sekolah Dasar (SD/MI)	18
1.4.	Fasilitas Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs).....	19
1.5.	Fasilitas Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/MA/SMK) ..	20
2.	Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan	24
2.1.	Fasilitas dan Sarana Kesehatan.....	24
2.2.	Tenaga Kesehatan	25
3.	Fasilitas Perdagangan dan Ekonomi	29
3.1.	Industri Mikro, Kecil, dan Jasa Ekonomi	29
3.2.	Industri Mikro, Kecil, dan Jasa Ekonomi	30

Sekilas Pendataan Potensi Desa

Pendataan Potensi Desa (Podes) telah dilaksanakan sejak tahun 1980. Pengumpulan data Podes dilakukan sebanyak tiga kali dalam kurun waktu sepuluh tahun, sebagai bagian dari siklus sepuluh tahunan kegiatan sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Podes dilaksanakan secara sensus terhadap seluruh kabupaten/kota, kecamatan, dan wilayah administrasi pemerintahan terendah setingkat desa (wilayah administrasi setingkat desa yang dimaksud, yaitu: desa, kelurahan, nagari dan jorong di Sumatera Barat, Unit Permukiman Transmigrasi atau UPT, dan Satuan Permukiman Transmigrasi atau SPT yang masih dibina oleh kementerian terkait).

Pengumpulan data Podes dilakukan melalui wawancara langsung oleh petugas terlatih dengan narasumber yang relevan di wilayah pencacahan serta penelusuran dokumen terkait. Petugas wawancara adalah aparatur ataupun mitra kerja BPS Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan lulus pelatihan pendataan Podes. Sementara itu, narasumber yang dipilih adalah beberapa orang yang memiliki pengetahuan, kewenangan, dan tanggung jawab terhadap wilayah target pencacahan. Kemajuan pendataan dilaporkan dan dipantau secara langsung melalui situs web.

Potensi Desa Bikang

A. Perumahan dan Lingkungan Hidup

1. Penggunaan Listrik

Akses terhadap sumber energi listrik merupakan salah satu indikator vital dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan kesiapan infrastruktur dasar suatu wilayah. Berdasarkan pemutakhiran data Pendataan Potensi Desa (PODES), perkembangan penggunaan listrik di Desa Bikang menunjukkan dinamika yang positif.



Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

Gambar 1. Jumlah Keluarga Pengguna Listrik PLN di Desa Bikang 2024-2025

Penggunaan listrik yang bersumber dari jaringan PLN di Desa Bikang terus mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2024, tercatat

sebanyak 478 keluarga memanfaatkan layanan listrik PLN. Angka ini meningkat menjadi 481 keluarga pada tahun 2025, atau bertambah sebanyak 3 keluarga (0,63%) dalam kurun waktu satu tahun. Peningkatan ini menunjukkan adanya penambahan rumah tangga atau bangunan tempat tinggal baru yang terhubung ke jaringan distribusi PLN.

Tabel 1. Jumlah Keluarga Pengguna Listrik di Desa Bikang 2024-2025

Kelompok	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Keluarga Pengguna Listrik PLN	478	481
Keluarga Pengguna Listrik Non-PLN	0	0
Jumlah Keluarga Bukan Pengguna Listrik	0	0

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

Untuk kategori pengguna listrik Non-PLN (swadaya, generator mandiri, atau swasta) serta kelompok Bukan Pengguna Listrik, keduanya mencatatkan angka 0 keluarga pada tahun 2024 maupun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh rumah tangga di Desa Bikang terjangkau oleh jaringan listrik PLN, sehingga rasio elektrifikasi di desa ini tercatat sebesar 100% dari sumber PLN.

2. Penerangan Jalan Utama

Fasilitas penerangan di jalan utama desa merupakan salah satu prasarana pendukung keselamatan lalu lintas dan mobilitas warga.

Ketersediaan dan sumber energi penerangan jalan di Desa Bikang pada periode 2024–2025 disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Keberadaan dan Sumber Penerangan di Jalan Utama Desa Bikang 2024–2025

Indikator	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Keberadaan Penerangan Jalan Utama	Ada, Sebagian Kecil	Ada, Sebagian Kecil
Sumber Penerangan Utama	Listrik diusahakan oleh pemerintah (PLN)	Listrik diusahakan oleh pemerintah (PLN)

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

Dari sisi kebutuhan domestik, akses energi masyarakat sudah terfasilitasi secara konsisten. Sepanjang tahun 2024 dan 2025, sumber penerangan utama masyarakat tetap tidak berubah, yakni sepenuhnya mengandalkan pasokan listrik yang diusahakan oleh pemerintah melalui jaringan PLN.

Sementara itu, ketersediaan infrastruktur penerangan untuk fasilitas umum belum menunjukkan adanya perluasan atau peningkatan cakupan. Pada tahun 2024, keberadaan penerangan jalan utama tercatat dengan status "Ada, Sebagian Kecil", dan status tersebut masih bertahan pada tahun 2025. Stagnasi pada indikator ini mengindikasikan bahwa belum terdapat penambahan titik lampu jalan yang signifikan dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sehingga fasilitas penerangan yang memadai baru

mencakup sebagian kecil dari total jalan utama di wilayah desa tersebut.

3. Bahan Bakar Memasak

Bahan bakar yang digunakan rumah tangga untuk memasak merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur pola konsumsi energi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Perkembangan penggunaan bahan bakar utama untuk memasak di Desa Bikang pada periode 2024–2025 disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Bahan Bakar Utama untuk Memasak Sebagian Besar Keluarga di Desa Bikang 2024–2025

Indikator	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Bahan Bakar Utama Memasak	LPG 3 kg	LPG 3 kg

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

Berdasarkan data pada Tabel 3, bahan bakar utama yang digunakan oleh sebagian besar keluarga di Desa Bikang tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu 2024–2025, yaitu tetap bertumpu pada LPG 3 kg (Elpiji 3 kg). Kondisi ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi dari masyarakat Desa Bikang terhadap bahan bakar gas bersubsidi untuk pemenuhan kebutuhan energi harian rumah tangga. Ketersediaan pangkalan/agen LPG yang memadai di wilayah desa turut mendukung konsistensi penggunaan LPG 3 kg sebagai komoditas energi utama masyarakat.

4. Kejadian dan Pengaduan Pencemaran

Data indikator lingkungan hidup menunjukkan adanya perubahan yang sangat signifikan terhadap kualitas lingkungan di desa antara tahun 2024 dan 2025. Secara umum, telah terjadi degradasi kualitas lingkungan yang mencakup tiga elemen utama, yaitu air, tanah, dan udara.

Tabel 4. Kejadian, Sumber, dan Pengaduan Pencemaran Lingkungan di Desa Bikang 2024–2025

Jenis Pencemaran	Indikator	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Air	Kejadian Pencemaran	Tidak Ada	Ada
	Sumber Utama	-	Pabrik/Industri/Usaha
	Pengaduan Warga	-	Tidak Ada
Tanah	Kejadian Pencemaran	Tidak Ada	Ada
	Sumber Utama	-	Pabrik/Industri/Usaha
	Pengaduan Warga	-	Tidak Ada
Udara	Kejadian Pencemaran	Tidak Ada	Ada
	Sumber Utama	-	Pabrik/Industri/Usaha
	Pengaduan Warga	-	Tidak Ada

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025



Namun, kondisi ini berbalik pada tahun 2025. Telah terjadi kejadian pencemaran secara serentak pada ketiga elemen lingkungan tersebut (air, tanah, dan udara). Berdasarkan data, sumber utama dari seluruh kejadian pencemaran ini berasal dari aktivitas sektor yang sama, yakni keberadaan Pabrik/Industri/Usaha yang beroperasi di wilayah tersebut atau sekitarnya.

Satu temuan yang cukup menarik dari sisi sosial masyarakat adalah tidak adanya pengaduan warga. Meskipun pencemaran dari aktivitas industri telah menyentuh tiga elemen vital lingkungan sekaligus pada tahun 2025, hal tersebut belum memicu adanya laporan atau keluhan formal dari masyarakat setempat kepada pihak berwenang. Fenomena ketiadaan aduan ini bisa menjadi catatan khusus bagi pemerintah desa untuk menelaah lebih lanjut, apakah hal ini disebabkan oleh kurangnya saluran pengaduan, toleransi warga terhadap keberadaan industri, atau kurangnya kesadaran akan dampak lingkungan jangka panjang.

5. Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Lingkungan

Pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim mencerminkan upaya aktif masyarakat serta pemerintah desa dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Perkembangan kegiatan pelestarian lingkungan di Desa Bikang pada periode 2024–2025 disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Kegiatan Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Iklim di Desa Bikang 2024–2025

Jenis Kegiatan Pelestarian Lingkungan	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Penanaman/Pemeliharaan Pepohonan	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan
Pengolahan/Daur Ulang Sampah	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan
Penggunaan Pupuk Organik	Tidak ada kegiatan	Ada, warga terlibat

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

Pada aspek penghijauan dan tata kelola kebersihan lingkungan, kondisi tercatat stagnan. Sepanjang tahun 2024 hingga 2025, tidak teridentifikasi adanya aktivitas penanaman maupun pemeliharaan pepohonan. Situasi serupa juga terjadi pada indikator manajemen persampahan, di mana desa belum memiliki inisiatif atau kegiatan pengolahan dan daur ulang sampah selama dua tahun berturut-turut.

Meskipun aktivitas penghijauan dan pengelolaan sampah belum berjalan, perkembangan yang menggembirakan justru terlihat pada indikator penggunaan pupuk organik. Pada tahun 2024, tidak ada aktivitas pelestarian sama sekali di sektor ini. Namun, pada tahun 2025, mulai tercatat adanya kegiatan penggunaan pupuk organik yang langsung diikuti dengan partisipasi warga. Munculnya inisiatif ini mengindikasikan mulai tumbuhnya kesadaran dan keterlibatan



aktif masyarakat setempat dalam menerapkan praktik pengelolaan lahan yang lebih ekologis dan ramah lingkungan.



INFORMASI & KOMUNIKASI 2024-2025

Sebagian besar warga

warga yang menggunakan telepon seluler/handphone

Sinyal telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah Desa Bikang

Kuat



Terdapat

2

menara telepon seluler atau Base Transceiver Station (BTS) :



Sinyal internet telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah di Desa Bikang

5G/4G/LTE



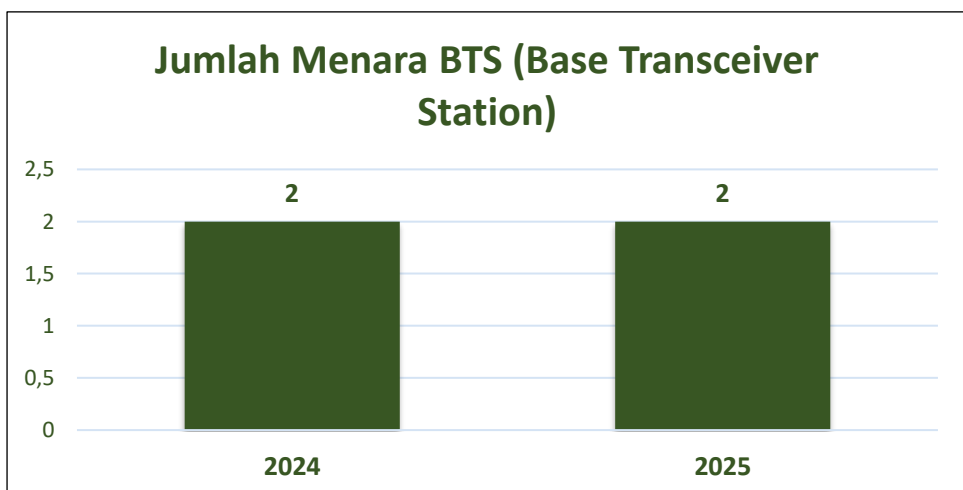
B. Infrastruktur Komunikasi dan Informasi

1. Keberadaan Menara BTS, Sinyal Telepon Seluler, dan Internet di Desa Bikang

Ketersediaan infrastruktur komunikasi serta kualitas sinyal telekomunikasi dan internet merupakan prasarana vital dalam mendukung konektivitas warga, digitalisasi pelayanan desa, serta pertumbuhan ekonomi berbasis digital. Perkembangan ketersediaan menara telepon seluler (BTS), kondisi sinyal telepon, dan jangkauan internet seluler di Desa Bikang pada periode 2024–2025 disajikan sebagai berikut.

1.1. Keberadaan Menara Base Transceiver Station (BTS)

Menara *Base Transceiver Station* (BTS) merupakan sarana fisik penerima dan pemancar gelombang telekomunikasi nirkabel yang menentukan daya jangkauan jaringan di suatu wilayah.



Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

Gambar 2. Jumlah Menara BTS di Desa Bikang 2024-2025

Pada periode pendataan 2024 hingga 2025, jumlah menara BTS yang berlokasi dan beroperasi di wilayah Desa Bikang tercatat stabil sebanyak 2 unit menara BTS. Keberadaan 2 unit menara pemancar ini menjamin pemerataan jangkauan jaringan nirkabel hingga ke area permukiman warga terluar dan kawasan sentra produksi desa.

1.2. Ketersediaan Operator Layanan Komunikasi

Keberagaman operator telekomunikasi yang menjangkau suatu wilayah memberikan pilihan akses jaringan bagi masyarakat sekaligus menciptakan kompetisi iklim usaha telekomunikasi yang sehat. Berdasarkan data PODES 2024–2025, ketersediaan jaringan operator seluler di Desa Bikang stabil dan terjangkau luas.



Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

Gambar 3. Jumlah Operator Layanan Komunikasi di Desa Bikang 2024-2025



Berdasarkan grafik ketersediaan layanan komunikasi, jumlah operator yang beroperasi di desa mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2024, tercatat terdapat 4 operator telekomunikasi yang melayani wilayah tersebut. Namun, pada tahun 2025, angka tersebut menyusut menjadi 3 operator, yang berarti terdapat pengurangan 1 penyedia layanan komunikasi dalam kurun waktu satu tahun.

20
25

JUMLAH FASILITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

JUMLAH FASILITAS PENDIDIKAN TAHUN 2025



0 SMA/SEDEREJAT

0 SMP/SEDEREJAT

1 SD/SEDEREJAT

1 TK/SEDERAJAT



JUMLAH FASILITAS KESEHATAN TAHUN 2025



0 PUSKESMAS

1 POSKESDES/
POLINDES

1 POSYANDU AKTIF

0 APOTEK



Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

20
24

JUMLAH FASILITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

JUMLAH FASILITAS PENDIDIKAN TAHUN 2024



0 SMA/SEDEREJAT

0 SMP/SEDEREJAT

1 SD/SEDEREJAT

1 TK/SEDERAJAT



JUMLAH FASILITAS KESEHATAN TAHUN 2024



0 PUSKESMAS

1 POSKESDES/
POLINDES

1 POSYANDU AKTIF

0 APOTEK



Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

C. Ketersediaan Fasilitas Aksesibilitas Dasar

1. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan merupakan prasarana vital dalam mendukung pemerataan serta kualitas sumber daya manusia di tingkat desa. Ketersediaan unit sekolah di wilayah desa tidak hanya menjamin hak anak atas pendidikan dasar, tetapi juga mengurangi biaya transportasi dan risiko perjalanan siswa. Pada bagian ini, pembahasan dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu ketersediaan unit sekolah di dalam desa dan tingkat aksesibilitas menuju fasilitas pendidikan terdekat.

1.3. Fasilitas Sekolah Dasar (SD/MI)

Pendidikan sekolah dasar merupakan jenjang awal dalam pembentukan kemampuan literasi dan numerasi anak usia sekolah. Ketersediaan dan jumlah unit fasilitas SD dan MI menurut status pengelolaannya di Desa Bikang pada periode 2024–2025 disajikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Jumlah Fasilitas Pendidikan SD/MI Menurut Status Pengelolaan di Desa Bikang 2024–2025

Jenjang Pendidikan	2024 (Negeri)	2024 (Swasta)	2025 (Negeri)	2025 (Swasta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sekolah Dasar (SD)	1	0	1	0
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	0	0	0	0

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

Berdasarkan data pada Tabel 6, seluruh fasilitas Sekolah Dasar yang berada di wilayah Desa Bikang berstatus Negeri (dikelola oleh pemerintah). Pada periode 2024–2025, jumlah fasilitas SD Negeri tercatat stabil sebanyak 1 unit, tanpa keberadaan SD swasta maupun Madrasah Ibtidaiyah (MI). Keberadaan 1 unit SD Negeri di Desa Bikang menunjukkan bahwa hanya terdapat sebuah sekolah dasar untuk menampung seluruh anak usia sekolah dasar di wilayah desa.

1.4. Fasilitas Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)

Jenjang Sekolah Menengah Pertama berperan penting dalam penuntasan program wajib belajar 9 tahun. Perkembangan ketersediaan unit SMP dan MTs di Desa Bikang periode 2024–2025 disajikan pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Jumlah Fasilitas Pendidikan SMP/MTs Menurut Status Pengelolaan di Desa Bikang 2024–2025

Jenjang Pendidikan	2024 (Negeri)	2024 (Swasta)	2025 (Negeri)	2025 (Swasta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0	0	0	0
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	0	0	0	0

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

Infrastruktur pendidikan jenjang menengah pertama belum tersedia di wilayah desa ini. Sepanjang periode pengamatan dari tahun 2024 hingga 2025, data menunjukkan ketiadaan absolut untuk fasilitas Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), baik yang berstatus negeri maupun swasta. Tidak adanya fasilitas pada jenjang pendidikan ini mengindikasikan bahwa penduduk usia sekolah menengah pertama di desa tersebut harus mengakses layanan pendidikan dasar sembilan tahun di luar batas wilayah administrasi desa. Kondisi ini dapat menjadi catatan bagi perencanaan pembangunan desa atau pertimbangan zonasi pendidikan di tingkat kecamatan.

1.5. Fasilitas Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/MA/SMK)

Pendidikan menengah atas merupakan jenjang lanjutan setelah pendidikan dasar 9 tahun yang mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi maupun memasuki dunia kerja. Perkembangan ketersediaan unit SMA, MA, dan SMK di Desa Bikang pada periode 2024–2025 disajikan pada Tabel 6.3 berikut.

Tabel 8. Jumlah Fasilitas Pendidikan SMA/MA/SMK Menurut Status Pengelolaan di Desa Bikang 2024–2025

Jenjang Pendidikan	2024 (Negeri)	2024 (Swasta)	2025 (Negeri)	2025 (Swasta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sekolah Menengah Atas (SMA)	0	0	0	0



Jenjang Pendidikan	2024 (Negeri)	2024 (Swasta)	2025 (Negeri)	2025 (Swasta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Madrasah Aliyah (MA)	0	0	0	0
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	0	0	0	0

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

Berdasarkan data pada Tabel 8, tidak terdapat fasilitas fisik SMA, MA, maupun SMK di dalam wilayah Desa Bikang, baik yang berstatus Negeri maupun Swasta pada periode 2024–2025. Ketiadaan sekolah menengah atas di dalam wilayah desa mengharuskan lulusan SMP/MTs asal Desa Bikang untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah yang berada di luar wilayah desa. Meskipun harus ditempuh ke luar desa, tingkat kemudahan untuk mencapai SMA/SMK terdekat berada pada kategori "Sangat Mudah". Hal ini didukung oleh ketersediaan fasilitas jalan utama desa yang sudah memadai dan dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun.

KESEHATAN 2025

1

JUMLAH PRAKTIK TENAGA
KESEHATAN



0

DOKTER PRAKTIK
MANDIRI

1

BIDAN PRAKTIK
MANDIRI

0

PERAWAT PRAKTIK
MANDIRI

2

JUMLAH UPAYA KESEHATAN
BERSUMBERDAYA
MASYARAKAT
(SETAHUN TERAKHIR)

1

POSYANDU AKTIF

1

POSBINDU

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

KESEHATAN 2024

1

JUMLAH PRAKTIK TENAGA
KESEHATAN



0

DOKTER PRAKTIK
MANDIRI

1

BIDAN PRAKTIK
MANDIRI

0

PERAWAT PRAKTIK
MANDIRI

2

JUMLAH UPAYA KESEHATAN
BERSUMBERDAYA
MASYARAKAT
(SETAHUN TERAKHIR)

1

POSYANDU AKTIF

1

POSBINDU

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

2. Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

2.1. Fasilitas dan Sarana Kesehatan

Fasilitas kesehatan fisik yang berada di dalam wilayah desa berperan sebagai tempat pertolongan pertama dan pusat pelayanan kesehatan promotif serta preventif. Perkembangan jumlah unit fasilitas kesehatan di Desa Bikang pada periode 2024–2025 disajikan pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Jenisnya di Desa Bikang 2024-2025

Jenis Fasilitas Kesehatan	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Rumah Sakit / RSAB	0	0
Puskesmas Tanpa Rawat Inap	0	0
Puskesmas Pembantu (Pustu)	0	0
Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) / Polindes	1	1
Posyandu Aktif	1	1
Apotek / Toko Obat	0	0
Total Fasilitas Kesehatan	2	2

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

Berdasarkan data pada Tabel 9, ketersediaan fasilitas kesehatan fisik di Desa Bikang berada pada kondisi yang stabil selama kurun waktu 2024–2025. Pelayanan kesehatan masyarakat desa

difasilitasi oleh 1 unit Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) serta 1 unit Posyandu aktif.

Keberadaan 1 unit Posyandu aktif di Desa Bikang menunjukkan bahwa pemantauan tumbuh kembang balita, pelayanan imunisasi, serta kesehatan ibu hamil dan lansia sudah terjangkau secara rutin di tingkat RT/dusun. Sementara itu, untuk fasilitas kesehatan dengan skala pelayanan yang lebih besar seperti Rumah Sakit, Puskesmas, maupun Apotek belum tersedia di wilayah Desa Bikang.

2.2. Tenaga Kesehatan

Keberadaan tenaga medis di wilayah desa menentukan kualitas pelayanan dan Kecepatan penanganan masalah kesehatan warga. Perkembangan jumlah tenaga kesehatan yang berpraktik atau bertempat tinggal di Desa Bikang pada periode 2024–2025 disajikan pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10. Jumlah Praktik Tenaga Kesehatan Menurut Kualifikasi di Desa Bikang 2024-2025

Praktik Tenaga Kesehatan	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Dokter Praktik Mandiri	0	0
Bidan Praktik Mandiri / Desa	1	1
Perawat Praktik Mandiri	0	0
Tenaga Kesehatan Lainnya	0	0
Total Tenaga Kesehatan	1	1



Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

Berdasarkan data pada Tabel 10, ketersediaan tenaga medis yang berpraktik mandiri di Desa Bikang tercatat konsisten pada kurun waktu 2024–2025. Pelayanan medis dasar di desa ditopang oleh keberadaan 1 orang bidan praktik mandiri.

Keberadaan bidan desa ini menjadi tumpuan utama masyarakat Desa Bikang dalam mengakses pertolongan pertama, pemeriksaan kesehatan rutin, hingga proses persalinan dasar. Konsistensi jumlah tenaga kesehatan ini menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan warga desa tanpa terjadi kelangkaan tenaga medis.

JUMLAH SARANA PRASARANA



EKONOMI TAHUN 2025



0 Kelompok
Pertokoan

0 Minimarket/ Swalayan
/Supermarket

1 Pasar



0 Restoran/
Rumah Makan

18 Warung/Kedai
Makanan Minuman

34 Toko/ Warung
Kelontong



JUMLAH SARANA PRASARANA



EKONOMI TAHUN 2024



0

Kelompok
Pertokoan

0

Minimarket/ Swalayan
/Supermarket

1

Pasar

0

Restoran/
Rumah Makan

15

Warung/Kedai
Makanan Minuman

38

Toko/Warung
Kelontong



3. Fasilitas Perdagangan dan Ekonomi

3.1. Industri Mikro, Kecil, dan Jasa Ekonomi

Sarana perdagangan eceran berfungsi sebagai saluran distribusi barang kebutuhan pokok maupun sekunder bagi warga desa. Perkembangan jumlah unit sarana perdagangan di Desa Bikang pada periode 2024–2025 disajikan pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11. Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Desa Bikang 2024-2025

Jenis Sarana Perdagangan	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Pasar dengan Bangunan Permanen/Semi Permanen	1	1
Pasar Tanpa Bangunan	0	0
Kelompok Pertokoan	0	0
Minimarket / Swalayan / Supermarket	0	0
Toko / Warung Kelontong	38	34
Warung / Kedai Makan Minum	15	18
Total Sarana Perdagangan	54	53

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

Profil pergerakan ekonomi desa, yang direpresentasikan oleh keberadaan sarana perdagangan, menunjukkan dominasi usaha skala mikro tradisional serta ketiadaan ritel modern. Sepanjang tahun 2024 hingga 2025, tidak tercatat adanya fasilitas



perdagangan berskala besar seperti kelompok pertokoan maupun minimarket/swalayan. Kebutuhan jual beli masyarakat bertumpu pada 1 unit pasar permanen/semi permanen yang keberadaannya tetap stabil selama dua tahun terakhir.

Terdapat pergeseran tren usaha mikro di tengah masyarakat yang cukup menarik. Meskipun total sarana perdagangan secara kumulatif turun tipis dari 54 menjadi 53 unit, terjadi realokasi jenis usaha. Jumlah toko/warung kelontong mengalami penyusutan sebanyak 4 unit (dari 38 menjadi 34 unit). Namun sebaliknya, sektor usaha penyediaan makanan dan minuman (warung/kedai) justru tumbuh dengan penambahan 3 unit baru (dari 15 menjadi 18 unit). Dinamika ini mengindikasikan adanya pergeseran minat atau peluang usaha di tingkat desa, dari sekadar perdagangan barang kebutuhan pokok menuju penyediaan layanan kuliner siap saji.

3.2. Industri Mikro, Kecil, dan Jasa Ekonomi

Keberadaan industri mikro/kecil dan penyedia jasa ekonomi mencerminkan keragaman mata pencaharian serta potensi kewirausahaan di desa. Perkembangan unit usaha industri dan jasa di Desa Bikang pada periode 2024–2025 disajikan pada Tabel 12 berikut.

Tabel 12. Jumlah Industri Mikro, Kecil, dan Sarana Jasa Ekonomi di Desa Bikang 2024-2025

Jenis Usaha / Jasa Ekonomi	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Jumlah IMK	8	10

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2024-2025

Sektor Industri Mikro dan Kecil (IMK) di desa menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2024, tercatat terdapat 8 unit usaha IMK yang beroperasi. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2025 menjadi 10 unit usaha. Penambahan 2 unit usaha baru ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi dan kewirausahaan masyarakat di sektor industri skala rumahan.



DATA POTENSI DESA TAHUN 2025

1. Identitas Desa

1.1.	Nama Provinsi	:	Kepulauan Bangka Belitung
1.2.	Nama Kabupaten	:	Bangka Selatan
1.3.	Nama Kecamatan	:	Toboali
1.4.	Nama Desa	:	Bikang
1.5.	Status Daerah	:	Perdesaan

2. Keterangan Umum Desa

2.1.	Topografi wilayah desa/kelurahan	:	Dataran
2.2.	Keberadaan permukiman penduduk di puncak/tebing/lereng	:	Tidak Ada
2.3.	Ada wilayah desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan laut	:	Tidak Ada
2.4.	Pemanfaatan laut untuk : Perikanan tangkap (mencakup seluruh biota laut)	:	Tidak Ada
2.5.	Pemanfaatan laut untuk : Perikanan budidaya (mencakup seluruh biota laut)	:	Tidak Ada
2.6.	Pemanfaatan laut untuk : Tambak garam	:	Tidak Ada
2.7.	Pemanfaatan laut untuk : Wisata bahari	:	Tidak Ada
2.8.	Pemanfaatan laut untuk : Transportasi umum	:	Tidak Ada
2.9.	Lokasi wilayah desa/kelurahan terhadap hutan	:	Di Tepi/Sekitar Kawasan Hutan
2.10.	Fungsi kawasan hutan	:	Produksi
2.11.	Jumlah Rukun Warga (RW)	:	0

2.12.	Jumlah Rukun Tetangga (RT)	:	9
--------------	----------------------------	---	----------

3. Perumahan dan Lingkungan Hidup

3.1	Jumlah keluarga pengguna listrik PLN	:	481
3.2	Jumlah keluarga pengguna listrik Non PLN	:	0
3.3	Jumlah keluarga bukan pengguna listrik	:	0
3.4	Penerangan di jalan utama desa/kelurahan	:	Ada, Sebagian Kecil
3.5	Sumber penerangan di jalan utama desa/kelurahan	:	Listrik Diusahakan Oleh pemerintah
3.6	Bahan bakar untuk memasak sebagian besar keluarga:	:	Elpiji 3 Kg
3.7	Kejadian pencemaran lingkungan: Air	:	Ada
3.8	Sumber pencemaran Air	:	Pabrik/ Industri/ Usaha
3.9	Pengaduan warga ke aparat desa/kelurahan: Kejadian pencemaran Air	:	Tidak Ada
3.10	Kejadian pencemaran lingkungan: Tanah	:	Ada
3.11	Sumber pencemaran Tanah	:	Pabrik/ Industri/ Usaha
3.12	Pengaduan warga ke aparat desa/kelurahan: Kejadian pencemaran Tanah	:	Tidak Ada

3.13	Kejadian pencemaran lingkungan: Udara	:	Ada
3.14	Sumber pencemaran Udara	:	Pabrik/ Industri/ Usaha
3.15	Pengaduan warga ke aparat desa/kelurahan : Kejadian pencemaran Udara	:	Tidak Ada
3.16	Penanaman/pemeliharaan pepohonan di lahan kritis, penanaman mangrove, dan sejenisnya oleh masyarakat desa/kelurahan	:	Tidak Ada kegiatan
3.17	Pengolahan/daur ulang sampah (reuse, recycle) oleh masyarakat desa/kelurahan	:	Tidak Ada kegiatan
3.18	Penggalakan penggunaan pupuk organik di lahan pertanian	:	Ada, Warga Terlibat
3.19	Pembuatan lubang biopori di desa/kelurahan	:	Tidak Ada
3.20	Pemanfaatan energi baru terbarukan (tenaga surya/angin/mikrohidro/biogas/biomassa /pasang surut/ arus laut) di desa/kelurahan	:	Tidak Ada
3.21	Penerapan pola tanam (rotasi tanaman, tumpang sari dll) di desa/kelurahan	:	Ada, Warga Terlibat
3.22	Penampungan/pemanenan air hujan di desa/kelurahan	:	Ada, Warga Terlibat
3.23	Pembuatan atau pemeliharaan terasering di desa/kelurahan	:	Tidak Ada

4. Bencana Alam dan Mitigasi Bencana Alam 2024-2025

4.1	Banyak kejadian tanah longsor 2024	:	Tidak Ada
4.2	Korban jiwa tanah longsor 2024	:	Tidak Ada
4.3	Banyak kejadian tanah longsor 2025	:	Tidak Ada
4.4	Korban jiwa tanah longsor 2025	:	Tidak Ada
4.5	Banyak kejadian Banjir 2024	:	Tidak Ada
4.6	Korban jiwa Banjir 2024	:	Tidak Ada
4.7	Banyak kejadian Banjir 2025	:	Tidak Ada
4.8	Korban jiwa Banjir 2025	:	Tidak Ada
4.9	Banyak kejadian Banjir bandang 2024	:	Tidak Ada
4.10	Korban jiwa Banjir bandang 2024	:	Tidak Ada
4.11	Banyak kejadian Banjir bandang 2025	:	Tidak Ada
4.12	Korban jiwa Banjir bandang 2025	:	Tidak Ada
4.13	Banyak kejadian Gempa bumi 2024	:	Tidak Ada
4.14	Korban jiwa Gempa bumi 2024	:	Tidak Ada
4.15	Banyak kejadian Gempa bumi 2025	:	Tidak Ada
4.16	Korban jiwa Gempa bumi 2025	:	Tidak Ada
4.17	Banyak kejadian Tsunami 2024	:	Tidak Ada
4.18	Korban jiwa Tsunami 2024	:	Tidak Ada
4.19	Banyak kejadian Tsunami 2025	:	Tidak Ada
4.20	Korban jiwa Tsunami 2025	:	Tidak Ada

4.21	Banyak kejadian Gelombang pasang laut 2024	:	Tidak Ada
4.22	Korban jiwa Gelombang pasang laut 2024	:	Tidak Ada
4.23	Banyak kejadian Gelombang pasang laut 2025	:	Tidak Ada
4.24	Korban jiwa Gelombang pasang laut 2025	:	Tidak Ada
4.25	Banyak kejadian Angin puyuh/puting beliung/topan 2024	:	Tidak Ada
4.26	Korban jiwa Angin puyuh/puting beliung/topan 2024	:	Tidak Ada
4.27	Banyak kejadian Angin puyuh/puting beliung/topan 2025	:	Tidak Ada
4.28	Korban jiwa Angin puyuh/puting beliung/topan 2025	:	Tidak Ada
4.29	Banyak kejadian Gunung meletus 2024	:	Tidak Ada
4.30	Korban jiwa Gunung meletus 2024	:	Tidak Ada
4.31	Banyak kejadian Gunung meletus 2025	:	Tidak Ada
4.32	Korban jiwa Gunung meletus 2025	:	Tidak Ada
4.33	Banyak kejadian Kebakaran hutan 2024	:	Tidak Ada
4.34	Korban jiwa Kebakaran hutan 2024	:	Tidak Ada
4.35	Banyak kejadian Kebakaran hutan 2025	:	Tidak Ada
4.36	Korban jiwa Kebakaran hutan 2025	:	Tidak Ada
4.37	Banyak kejadian Kekeringan (lahan) 2024	:	Tidak Ada
4.38	Korban jiwa Kekeringan (lahan) 2024	:	Tidak Ada

4.39	Banyak kejadian Kekeringan (lahan) 2025	:	Tidak Ada
4.40	Korban jiwa Kekeringan (lahan) 2025	:	Tidak Ada
4.41	Banyak kejadian abrasi 2024	:	Tidak Ada
4.42	Korban jiwa Abrasi 2024	:	Tidak Ada
4.43	Banyak kejadian abrasi 2025	:	Tidak Ada
4.44	Korban jiwa Abrasi 2025	:	Tidak Ada
4.45	Sistem peringatan dini bencana alam	:	Tidak Ada
4.46	Sistem peringatan dini khusus tsunami	:	Bukan Wilayah Potensi Tsunami
4.47	Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker, dll.)	:	Ada
4.48	Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana	:	Tidak Ada
4.49	Pembuatan, perawatan, atau normalisasi: sungai, kanal, tanggul, parit, drainase, waduk, pantai, dll. selama 3 tahun terakhir	:	Ada
4.50	Penggundulan hutan, hutan menjadi permukiman, kebun, tambang, dll dalam 5 tahun terakhir	:	Ada
4.51	Peningkatan Penggunaan pupuk kimia & pestisida dalam 5 tahun terakhir	:	Ada
4.52	Peningkatan perilaku kebiasaan membakar sampah dan membuang sampah di tempat ilegal dalam 5 tahun terakhir	:	Tidak Ada
4.53	Peningkatan jumlah pabrik dan industri dalam 5 tahun terakhir	:	Ada

4.54	Peningkatan jumlah warga yang memiliki kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dalam 5 tahun terakhir	:	Ada
4.54	Kelangkaan air karena kemarau panjang dalam 5 tahun terakhir	:	Ya, ada sebagian kecil
4.55	Penduduk desa semakin sulit bertani (serangan hama, kemarau Panjang, menangkap ikan di laut (cuaca ekstrem), dst) dalam 5 tahun terakhir	:	Ya, ada sebagian kecil
4.56	Penduduk desa kehilangan mata pencaharian yang bergantung pada alam (banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan, dll) dalam 5 tahun terakhir	:	Ya, ada sebagian kecil
4.57	Gangguan kesehatan (Pneumonia, Malaria, dan DBD) dalam 5 tahun terakhir	:	Ya, ada sebagian kecil
4.58	Kerusakan rumah dan harta benda karena bencana terkait iklim (banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, karhutla, gel. pasang) dalam 5 tahun terakhir	:	Tidak Merasakan
4.59	Gagal panen, kerusakan tanaman atau kematian ternak karena bencana terkait iklim dalam 5 tahun terakhir	:	Ya, ada sebagian kecil

5. Pendidikan dan Kesehatan

5.1	Jumlah TK negeri	:	0
5.2	Jumlah TK swasta	:	1
5.3	Jumlah RA/BA negeri	:	0

5.4	Jumlah RA/BA swasta	:	0
5.5	Jumlah SD negeri	:	1
5.6	Jumlah SD swasta	:	0
5.7	Jumlah MI negeri	:	0
5.8	Jumlah MI swasta	:	0
5.9	Jumlah SMP negeri	:	0
5.10	Jumlah SMP swasta	:	0
5.11	Jumlah MTs negeri	:	0
5.12	Jumlah MTs swasta	:	0
5.13	Jumlah SMA negeri	:	0
5.14	Jumlah SMA swasta	:	0
5.15	Jumlah MA negeri	:	0
5.16	Jumlah MA swasta	:	0
5.17	Jumlah SMK negeri	:	0
5.18	Jumlah SMK swasta	:	0
5.19	Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi negeri	:	0
5.20	Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi swasta	:	0
5.21	Jumlah Rumah Sakit	:	0
5.22	Jumlah Klinik Utama	:	0
5.23	Jumlah Balai Kesehatan		0
5.24	Jumlah puskesmas dengan rawat inap	:	0
5.25	Jumlah puskesmas tanpa rawat inap	:	0
5.26	Jumlah puskesmas pembantu	:	0
5.27	Jumlah klinik pratama	:	0
5.28	Jumlah praktek mandiri dokter	:	0
5.29	Jumlah praktek mandiri bidan	:	1
5.31	Jumlah poskesdes (pos kesehatan desa)	:	1
5.32	Jumlah polindes (pondok bersalin desa)	:	0
5.33	Jumlah apotek	:	0
5.34	Jumlah toko khusus obat/jamu	:	0
5.35	Jumlah posyandu aktif	:	1
5.36	Jumlah posyandu dengan kegiatan/pelayanan setiap sebulan sekali	:	1

5.37	Jumlah posyandu dengan kegiatan/pelayanan setiap 2 bulan sekali atau lebih	:	0
5.38	Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	:	1

6. Angkutan, Komunikasi, dan Informasi

6.1	Lalu lintas dari/ke desa/kelurahan melalui:	:	Darat
6.2	Jenis permukaan jalan yang terluas:	:	Aspal/Beton
6.3	Jalan darat dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih:	:	Sepanjang Tahun
6.4	Keberadaan angkutan umum:	:	Ada, dengan trayek tetap
6.5	Operasional angkutan umum yang utama:	:	Setiap Hari
6.6	Jam operasi angkutan umum yang utama:	:	Siang dan Malam Hari
6.7	Ketersediaan angkutan online (memesan angkutan online)	:	Tidak Ada
6.8	Sarana transportasi yang biasa digunakan dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor camat	:	Kendaraan Pribadi
6.9	Jenis angkutan umum dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor camat	:	-
6.10	Jenis angkutan umum yang utama dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor camat	:	-
6.11	Sarana transportasi yang biasa digunakan dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor bupati/walikota	:	Kendaraan Pribadi
6.12	Jenis angkutan umum dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor bupati/walikota	:	-

6.13	Jenis angkutan umum yang utama dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor bupati/walikota	:	-
6.14	Jumlah keluarga yang berlangganan telepon kabel	:	0 Keluarga
6.15	Keberadaan warga yang menggunakan telepon seluler/handphone	:	Sebagian Besar Keluarga
6.16	Jumlah menara Base Transceiver Station (BTS)	:	2
6.17	Jumlah operator layanan komunikasi telepon seluler/handphone yang menjangkau di desa/kelurahan	:	3 Jenis
6.18	Sinyal telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah desa/kelurahan	:	Sinyal kuat
6.19	Sinyal internet telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah di desa/kelurahan:	:	5G/4G/LTE
6.20	Keberadaan kantor pos/pos pembantu/rumah pos:	:	Tidak Ada
6.21	Layanan pos keliling:	:	Tidak Ada
6.22	Perusahaan/agen jasa ekspedisi (pengiriman barang/dokumen) swasta:	:	Beroperasi

7. Ekonomi

7.1	Keberadaan pangkalan/agen/penjual minyak tanah (termasuk penjual minyak tanah keliling):	:	Tidak Ada
7.2	Keberadaan pangkalan/agen/penjual LPG (warung, toko, supermarket, penjual gas keliling):	:	Ada

7.3	Jumlah Bank Umum Pemerintah (BRI, BNI, MANDIRI, BPD, BTN) yang beroperasi di desa/kelurahan:	:	0
7.4	Jumlah Bank Umum Swasta (BCA, Permata, Sinarmas, CIMB, dll) yang beroperasi di desa/kelurahan:	:	0
7.5	Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi di desa/kelurahan:	:	0
7.6	Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) yang masih aktif	:	0
7.7	Jumlah Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra)/Usaha Mikro yang masih aktif	:	0
7.8	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP/Kospin) yang masih aktif	:	0
7.9	Jumlah Koperasi Lainnya yang masih aktif	:	0
7.10	Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diterima warga desa/kelurahan selama setahun terakhir	:	Ada
7.11	Fasilitas Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KPP-E) yang diterima warga desa/kelurahan selama setahun terakhir	:	Tidak Ada
7.12	Fasilitas Kredit Usaha Kecil (KUK) yang diterima warga desa/kelurahan selama setahun terakhir	:	Ada
7.13	Fasilitas Kredit Usaha Bersama (KUBE) yang diterima warga desa/kelurahan selama setahun terakhir	:	Tidak Ada
7.14	Jumlah kelompok pertokoan	:	0
7.15	Jumlah Pasar dengan bangunan permanen	:	1
7.16	Jumlah Pasar dengan bangunan semi permanen	:	0
7.17	Jumlah Pasar tanpa bangunan	:	0

7.18	Jumlah minimarket/swalayan/supermarket	:	0
7.19	Jumlah Restoran/rumah makan	:	0
7.20	Jumlah Warung/kedai makanan minuman	:	18
7.21	Jumlah Hotel	:	0
7.22	Jumlah Penginapan	:	0
7.23	Jumlah Toko/warung kelontong	:	34
7.24	Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk desa/kelurahan berasal dari lapangan usaha	:	Pertanian
7.25	Komoditas utama dari sub sektor utama sebagian besar penduduk desa/kelurahan	:	-
7.26	Jumlah industri mikro dan kecil (memiliki tenaga kerja kurang dari 20 pekerja)	:	10
7.27	Jumlah Sentra Industri	:	0
7.28	Produk Sentra Industri Terbanyak	:	-
7.29	Keberadaan produk barang unggulan/utama	:	1
7.30	Produk Makanan unggulan/utama desa	:	Sirup Nanas
7.31	Produk Non Makanan unggulan/utama desa	:	-

8. Keamanan

8.1	Kejadian Perkelahian massal antar kelompok masyarakat	:	Tidak Ada
8.2	Pembangunan/pemeliharaan pos keamanan lingkungan:	:	Ada
8.3	Pembentukan/pengaturan regu keamanan:	:	Ada
8.4	Penambahan jumlah anggota hansip/linmas:	:	Tidak Ada

8.5	Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan:	:	Ada
8.6	Pengaktifan sistem keamanan lingkungan berasal dari inisiatif warga:	:	Tidak Ada

9. Keuangan dan Aset Desa

9.1	Keberadaan sistem informasi desa:	:	Ada, Tidak diperbaharui
9.2	Penggunaan sistem keuangan desa:	:	Ada, diperbaharui
9.3	Jumlah unit usaha BUMDes	:	1
9.4	Tanah kas desa/ulayat	:	Ada
9.5	Tambatan Perahu	:	Tidak Ada
9.6	Pasar desa (pasar hewan, pelelangan ikan yang dikelola desa, pelelangan hasil pertanian, dll.)	:	Tidak Ada
9.7	Bangunan milik desa (balai desa, balai rakyat, lapangan olah raga, dll.)	:	Ada
9.8	Hutan milik desa	:	Ada
9.9	Mata air milik desa	:	Tidak Ada
9.10	Tempat wisata/pemandian umum	:	Tidak Ada
9.11	Aset lainnya milik desa	:	Ada
9.12	Jumlah peraturan desa tahun 2024	:	6 buah

10. Keterangan Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan

14.1	Keberadaan: Kepala Desa/Lurah	:	Ada
14.2	Umur Kepala Desa/Lurah	:	42 tahun
14.3	Jenis kelamin Kepala Desa/Lurah	:	Laki-Laki
14.4	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Kepala Desa/Lurah	:	SMU/Sederajat



14.5	Keberadaan: Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan	:	Ada
14.6	Umur Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan	:	33 tahun
14.7	Jenis kelamin Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan	:	Laki-Laki
14.8	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan	:	Diploma IV/S1
14.9	Jumlah aparatur pemerintahan: Sekretariat Desa/Kelurahan (kaur keuangan, dll)	:	3
14.10	Jumlah aparatur pemerintahan: Pelaksana Teknis (kasi kesejahteraan, dll)	:	3
14.11	Jumlah aparatur pemerintahan: Pelaksana Kewilayahan (Kadus, Ketua RT, dll.)	:	3
14.12	Jumlah aparatur pemerintahan: Pegawai desa/kelurahan lainnya (hansip, dll)	:	5
14.13	Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan	:	Ada
14.14	Jumlah kegiatan musyawarah desa/kelurahan yang dilakukan selama tahun 2024	:	7





DATA

Mencerdaskan Bangsa